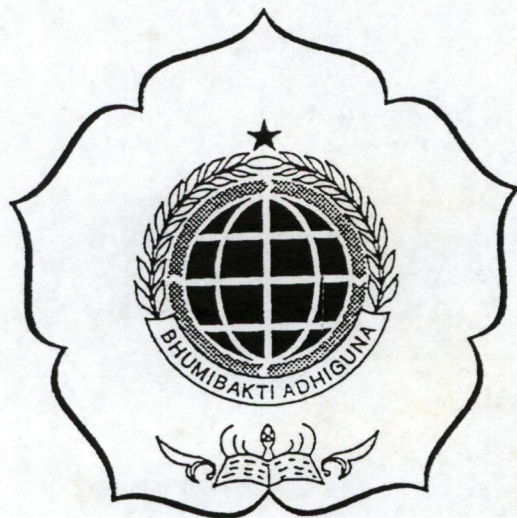


**PENGARUH PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN
TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH
DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

M. HELMY FAUZIE

NIM : 9761250

INTISARI

Kegiatan PRONA Pertanahan yang dulu dikenal dengan nama PRONA Agraria meliputi : penyuluhan, pendaftaran peserta/pemohon, pengukuran dan hasil akhirnya berupa sertipikat hak atas tanah. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut pada suatu daerah yang terkena PRONA Pertanahan diharapkan dapat memberi pengaruh kepada masyarakat bukan peserta PRONA Pertanahan agar atas kesadaran sendiri setelah memahami arti pentingnya kegunaan sertipikat, mereka akan berminat atau tergerak hatinya untuk mengurus sertipikat hak atas tanah di kantor pertanahan setempat, sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan pengaruh bagi kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan. PRONA Pertanahan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak Tahun 1981 berhasil dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan predikat yang disandang oleh kantor pertanahan tersebut yaitu sebagai kantor pertanahan terbaik tingkat propinsi dalam pelaksanaan PRONA Pertanahan beberapa tahun terakhir ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah penyusun ingin mengetahui apakah pelaksanaan PRONA Pertanahan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Kecamatan Amuntai tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian survai dengan informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik tanah yang bukan peserta di lokasi PRONA Pertanahan di Kecamatan Amuntai Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *stratified proportional random sample*, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis satu variabel atau tabel frekuensi, analisis tabulasi silang dan analisis *kuantitatif* statistik.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan PRONA Pertanahan tidak menunjukkan adanya hubungan yang kuat terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah yaitu pensertipikatan tanah secara rutin/sendiri-sendiri sehingga bisa dikatakan tidak ada pengaruh pelaksanaan PRONA Pertanahan terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	5
A. Tinjauan Pustaka.....	5
1. Proyek Operasi Nasional Pertanahan.....	5
2. Minat Masyarakat.....	6
3. Pensertipikatan Tanah.....	8
4. Hasil-hasil Penelitian Sebelumnya.....	10
B. Kerangka Pemikiran.....	12
C. Hipotesis.....	16
D. Batasan Operasional.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18

4. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data	20
a. Teknik Pengumpulan Data	20
b. Jenis Data dan Sumber Data.....	21
5. Teknik Analisis Data.....	22
B. Pelaksanaan Penelitian.....	24
1. Organisasi.....	24
2. Jadwal Penelitian	24
BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....	26
A. Keadaan Geografis.....	26
B. Penggunaan Tanah.....	28
C. Jumlah Penduduk.....	28
D. Penguasaan atau Hak Atas Tanah.....	30
E. Pelaksanaan PRONA Pertanahan	32
BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN.....	35
A. Penyajian Data	35
1. Tingkat Pendidikan	35
2. Umur Responden.....	35
3. Pekerjaan Responden.....	36
4. Asal Penguasaan Tanah	36
B. Analisis Data.....	37
1. Analisis Satu Variabel atau Tabel Frekuensi	37
a. Penyuluhan dan Informasi.....	39
b. Pembiayaan	41
c. Pelaksanaan PRONA Pertanahan.....	41
d. Tanggapan Terhadap Sertipikat Tanah.....	41
e. Minat Masyarakat.....	43
2. Analisis Tabulasi Silang.....	45
3. Analisis <i>Kuantitatif</i> /Statistik.....	46
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DIWAKAFI HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Realisasi dari ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini menjadi dasar bagi kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada saat sekarang, Badan Pertanahan Nasional (Pemerintah) baru berhasil mendaftarkan sekitar 22.000.000 bidang tanah dari perkiraan 55.000.0000 bidang tanah (bisa lebih), di luar tanah kehutanan. Sampai saat sekarang belum ada satu daerah (Kabupaten atau Kota) yang bidang-bidang tanahnya seluruhnya telah terdaftar, hal ini akan merupakan kendala dalam pelaksanaan otonomi (Kurdinanto Sarah, 2000 : 6).

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut hingga saat ini pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum tercapai seperti yang diharapkan, penyebabnya adalah di samping kemampuan negara untuk membiayai pelaksanaan pendaftaran tanah yang sangat terbatas, juga rendahnya kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan.

Salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan, agar mereka mau berpartisipasi dalam pendaftaran tanah serta mensukseskan catur tertib pertanahan sebagaimana digariskan pada Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga pada kegiatan Keagrariaan/Pertanahan, maka langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah antara lain berupa usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan

Selanjutnya dengan adanya peningkatan status Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri menjadi Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka PRONA disesuaikan menjadi PRONA Pertanahan.

Isi dari keputusan itu, salah satu tujuan PRONA Pertanahan adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan agar lebih sadar akan hak dan kewajiban atas tanah sehingga mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan pendaftaran tanah. Sebagai sasaran akhirnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya atas tanah. Selanjutnya dalam rangka menumbuhkan gairah masyarakat, khususnya bagi golongan ekonomi lemah untuk mengurus sertipikat hak atas tanahnya maka ditetapkan biaya yang ringan terhadap pemberian hak-hak atas tanah negara, maupun penegasan tanah-tanah hak adat yang dijadikan lokasi/obyek PRONA Pertanahan, untuk pensertipikatan tanah secara massal.

Jadi dengan PRONA ini pemerintah memberikan rangsangan kepada pemegang hak atas tanah agar mau mensertipikatkan tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sebaik-baiknya sengketa-sengketa yang sifatnya strategis dengan jalan memberikan kepada mereka (pemegang hak atas tanah) berbagai fasilitas/kemudahan. Adapun bentuk fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak atas tanah itu adalah berupa keringanan dalam hal pembiayaan dan percepatan proses penyelesaian sertipikat hak tanahnya (Sudjito, SH, 1987 : 7).

Pelaksanaan PRONA Pertanahan tersebut, masyarakat diharapkan menjadi sadar akan pentingnya sertipikat hak atas tanah, serta berusaha untuk memperolehnya dengan jalan mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat secara sendiri-sendiri/rutin, sesuai dengan kesiapan dan kemampuan masing-masing.

PRONA Pertanahan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak Tahun 1981 berhasil dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan predikat yang disandang oleh Kantor Pertanahan tersebut yaitu sebagai Kantor Pertanahan terbaik tingkat propinsi dalam pelaksanaan PRONA Pertanahan beberapa tahun terakhir ini.

Atas dasar uraian tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN”**.

B. Perumusan Masalah

Diketahui bahwa kegiatan PRONA Pertanahan meliputi : penyuluhan, pendaftaran peserta/pemohon, pengukuran dan hasil akhirnya berupa sertipikat hak atas tanah. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut tentunya akan ada pengaruh kepada masyarakat yang bukan peserta PRONA Pertanahan.

Suatu daerah yang terkena PRONA Pertanahan diharapkan dapat memberi pengaruh kepada masyarakat yang bukan peserta PRONA Pertanahan agar atas kesadaran sendiri setelah memahami arti pentingnya kegunaan sertipikat mereka akan berminat atau tergerak hatinya untuk mengurus sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan, sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan pengaruh bagi kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : “ Apakah pelaksanaan PRONA Pertanahan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan

C. Pembatasan Masalah

1. PRONA Pertanahan yang dilaksanakan sejak Tahun 1981 sampai dengan Tahun 2000 di Kecamatan Amuntai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan.
2. Minat masyarakat pemilik tanah yang bukan peserta PRONA Pertanahan di lokasi PRONA Pertanahan untuk mensertipikatkan tanahnya secara rutin akibat pengaruh dari pelaksanaan proyek tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakan penelitian ini adalah :

Mengetahui pengaruh pelaksanaan PRONA Pertanahan terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan informasi tentang pengaruh pelaksanaan PRONA Pertanahan terhadap minat masyarakat dalam pensertipikatan tanahnya;
- b. Bahan masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam upaya membangkitkan motivasi masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan PRONA Pertanahan menunjukkan tidak adanya hubungan dengan minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah dalam hal ini pensertipikatan secara rutin/sendiri-sendiri, sehingga dapat dikatakan tidak ada pengaruhnya sama sekali ditambah dengan data mengenai produktifitas penerbitan sertipikat juga tidak menunjukkan hasil yang mendukung adanya pengaruh tersebut. Oleh karena itu hipotesis tidak terbukti. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penyuluhan di bidang pertanahan yang kurang dari pihak kantor pertanahan setempat yang berakibat kesadaran hukum masyarakat menjadi rendah, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang mahal

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penyusun dapat memberikan saran, antara lain : Bahwa penyuluhan sebagai faktor penentu keberhasilan kegiatan di bidang pertanahan agar lebih ditingkatkan intensitas maupun materi sehingga dapat mudah dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan, prosedur yang berbelit-belit hendaknya lebih disederhanakan lagi dan biaya yang tidak perlu agar dihapuskan sehingga tidak membebani masyarakat dalam pensertipikatan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1990), Rencana Pembangunan Lima Tahun V Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional.
- Astrid, Phil S. Susanto (1976), Filsafat Komunikasi, Ed.1, Bandung, Bina Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, (1998), Prosedur Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta
- Bintarto R., Surastopo Hadisumarno, (1987), Metode Analisa Geografi, Jakarta, LP3ES.
- Hetarie, Inyo Cancer, (1992), Pengaruh PRONA Pertanahan Terhadap Minat Masyarakat Daerah Sekitarnya Dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Dati II Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Skripsi D-IV, Yogyakarta, Akademi Pertanahan Nasional.
- Petrus, Heinrich E. T., (1996), Pengaruh PRONA Pertanahan Terhadap Minat Masyarakat Sekitarnya Dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Seyegan Kabupaten Dati II Sleman Propinsi D. I. Yogyakarta, Skripsi D-IV, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Poerwadarminta, WJS, (1976), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rahmat, Fahrul, (1995), Pengaruh PRONA Pertanahan Terhadap Minat Mensertipikatkan Tanah Secara Rutin Oleh Masyarakat Disekitarnya di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Dati II Magetan Propinsi Jawa Timur, Skripsi D-IV, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sarah, Kurdinanto, (2000), Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan, Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian Skripsi dan Ujian Negara, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, (1989), Metode Penelitian Survai, Ed.Revisi, Jakarta, LP3ES.
- Sudijono, Anas, (1999), Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta, Rajawali Pers

- Sumaryo, (1988), Pengaruh Pensertipikatan Tanah Melalui PRONA Terhadap Pensertipikatan Tanah Secara Rutin di Kecamatan Sigaluh Kabupaten Dati II Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, Skripsi D-IV, Yogyakarta, Akademi Pertanahan Nasional.
- Sunindhia, Y. W., dan Ninik Widiyanti, (1988), Pembaharuan Hukum Agraria, Jakarta, Bina Aksara.
- Suparman, I. A., (1995), Statistik Sosial, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryasubrata, Sumadi, (1990), Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi, Yogyakarta, Andi Offset.
- Sutopo, Heru, (1995), Tinjauan Pelaksanaan PRONA Pertanahan Terhadap Meningkatnya Minat Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Dati II Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat, Skripsi D-IV, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wahyudi, Harun, (1995), Pengaruh PRONA Pertanahan Terhadap Minat Masyarakat Sekitarnya Dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Temon Kabupaten Dati II Kulon Progo Propinsi D. I. Yogyakarta, Skripsi D-IV, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Walgito, Bimo, (1990), Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta, Andi Offset.
- Whiterington, (1995), Psikologi Pendidikan (terjemahan), H. Bukhori, Jakarta, Aksara Baru
- Yunaldi, (1996), Pengaruh PRONA Pertanahan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Dati II Padang Pariaman, Skripsi D-IV, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional